



LOKA POM
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAPORAN KINERJA

2022

Triwulan 1

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2022 maka Laporan Kinerja (LAPKIN) Loka POM di Kab. Indragiri Hilir disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

LAPKIN Triwulan I Tahun 2022 Loka POM di Kab. Indragiri Hilir disusun pada akhir periode triwulan I Tahun 2022 anggaran pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu : (a) merupakan sarana bagi Loka POM di Kab. Indragiri Hilir untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran, serta (b) sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, baik dalam bentuk regulasi maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hilir. Dalam Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir Triwulan I Tahun 2022 tertuang realisasi kinerja Triwulan I Tahun 2022 serta membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Loka POM di Kab. Indragiri Hilir, evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2022 diharapkan akan memberikan informasi yang bermanfaat atas kinerja yang telah dicapai dan menjadi pijakan dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan rekomendasi perbaikan kinerja saat ini untuk peningkatan kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir pada masa yang akan datang.

Indragiri Hilir,
Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hilir



Emi Amalia, S.Farm, Apt, M.Sc

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja 2022 yang sasaran strategis dan indikator kerjanya didasarkan pada Renstra 2020-2024. Untuk mencapai tujuan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir, telah ditetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis, yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT
3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UP
4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT
6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Mekuatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan
9. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Pada triwulan 1 tahun 2022, dari 9 sasaran strategis yang telah ditetapkan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir terdapat 2 sasaran strategis yang dengan kategori baik, dengan rincian sebagai berikut :

1. Sasaran Stretegis 1 “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 123,93%
2. Sasaran strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 61.12%
3. Sasaran Stretegis 3 “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 104,32%
4. Sasaran Stretegis 4 “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 98,24%

5. Sasaran Stretegis 5 “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai 0%
6. Sasaran Stretegis 6 “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal” dengan nilai 133,3%
7. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal
8. Sasaran Stretegis 8 “Menguatnya laboratoruim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan nilai 22,22%
9. Sasaran Stretegis 9 “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan nilai 209,33%

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir terus melakukan perbaikan untuk triwulan berikutnya yaitu dengan Percepatan proses pengadaan barang dan jasa dan memastikan proses pengadaan sudah berjalan sesuai ketentuan, meningkatkan komitmen para penanggung jawab kegiatan agar mengawal pelaksanaan POA sesuai dengan rencana dan monitoring evaluasi pelaksanaan anggaran haru menjadi pedoman agar dapat memaksimalkan serapan anggaran

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	II
Daftar Isi	IV
Daftar Gambar.....	V
Daftar Tabel	VI
BAB 1	
PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	3
1.3. Struktur Organisasi	12
1.4. Isu Strategis	12
BAB 2	
PERENCANAAN	
KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Renstra	16
2.1.1 Visi	16
2.1.2 Misi	17
2.1.3 Tujuan	19
2.1.4 Sasaran Strategis	19
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	30
2.3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)	32
BAB 3	
AKUNTABILITAS	
KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	35
3.1.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja	36
3.2. Realisasi Anggaran	41
3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya	42
BAB 4	
PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	45
4.2. Saran	45

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	3
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Indragiri Hilir dan Indragiri Hulu	6
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	7
Gambar 2.1	Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	20
Gambar 3.1	Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir s.d TW I Tahun 2022	42

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	Hal 9
Tabel 2.1	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024	20
Tabel 2.2	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	30
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM Di Kab.Indragiri Hilir Triwulan I Tahun 2022	32
Tabel 3.1	Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hilir s.d Triwulan I Tahun 2022	35
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hilir Triwulan I tahun 2022	36
Tabel 3.3	Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hilir Triwulan I Tahun 2022	42

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengawasan obat dan makanan merupakan tugas strategis yang menyangkut multisektor (aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan/ketertiban masyarakat) dan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat, juga berupaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha agar dapat memenuhi ketentuan dan berdaya saing nasional maupun internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPOM tidak bertindak sebagai single player. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), BPOM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *pro-active control*, dengan mendorong penerapan manajemen resiko.

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024, yaitu : melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampling dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik

dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

Wilayah kerja Loka Pom di kab. Indragiri Hilir terdiri dari 2 kabupaten/kota, yaitu : Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu.

Loka POM telah menjalin kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui terbentuknya Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Perjanjian Kerjasama dan MoU dalam upaya saling memberikan dukungan dan pertukaran informasi terkait dengan pengawasan dan pengendalian peredaran Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu. Loka POM di kab. Indragiri Hilir juga menjalin hubungan kerjasama dengan perguruan tinggi terkait dengan pengembangan kompetensi SDM dan sebaliknya memberikan fasilitas pembelajaran bagi mahasiswa terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Badan POM.

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2022 adalah 20 (dua puluh) orang yaitu 13 (tiga belas) orang PNS dan 8 (delapan) orang tenaga kontrak. Mengingat tantangan dan permasalahan yang dihadapi ke depan lebih sulit dan beragam serta berdasarkan analisa beban kerja, diperlukan penambahan SDM secara bertahap serta pelatihan setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial dalam menjalankan fungsi sebagai Pengawas Obat dan Makanan.

Menjawab tantangan pengawasan tersebut tentunya diperlukan sistem pengawasan berbasis resiko (*risk base inspection*), penetapan kegiatan - kegiatan prioritas serta penguatan jejaring dengan lintas sektor sehingga dapat memberikan daya ungkit pengawasan yang lebih optimal dan paripurna

Pola transportasi dari Loka POM di Kab. Indragiri Hilir ke wilayah pengawasan ditempuh melalui jalan darat dan perairan. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja rata-rata selama 6 jam (paling lama 48 jam dan paling singkat 0.5 jam).

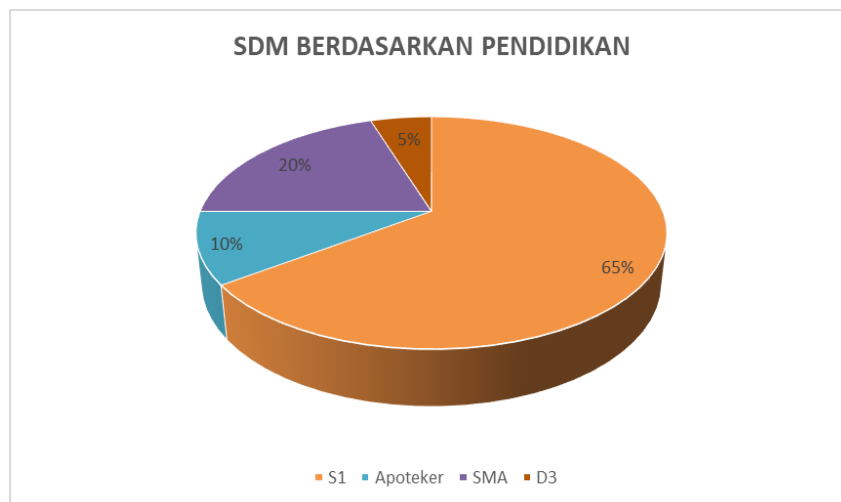
Lamanya waktu perjalanan ke wilayah kerja dengan kondisi geografis merupakan salah satu faktor kesulitan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Namun hal ini tidak menjadi hambatan justru menjadi tantangan bagi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan revitalisasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan produksi dalam negeri maupun luar negeri (impor) yang beredar di masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan IPTEK dan modernisasi akan mempengaruhi gaya/pola hidup masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, yang berakibat pada pola konsumsi masyarakat yang kurang memperhatikan pemenuhan standar Kesehatan.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Internal - Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia dengan jumlah yang memadai dan dengan kompetensi sesuai mutlak dibutuhkan untuk mendukung tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan. Jumlah SDM kantor Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 12 orang dan dibantu oleh 8 orang tenaga PPNPN (termasuk satpam dan petugas kebersihan).



Gambar 1.1 Tingkat Pendidikan Pegawai Loka POM di Kab. Indragiri Hilir Tahun 2022

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan-pelatihan teknis. Namun demikian, jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK). Dari hasil analisa beban kerja

tahun 2023 yang didasarkan pada cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir, peta jabatan serta tugas pokok dan fungsi dibutuhkan 100 orang pegawai. Jumlah pegawai yang ada hanya 20 orang (ASN dan PPNPN admin) sehingga masih terdapat kekurangan sejumlah 79 orang. Oleh karena itu tugas pengawasan obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir belum memberikan hasil yang maksimal. Kondisi ini ditambah dengan jumlah tenaga yang kompeten untuk beberapa tugas tertentu seperti Inspektur CDOB, Inspektur Pangan dan PPNS masih sangat terbatas.

Internal - Sumber Daya Lainnya

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir memiliki bangunan gedung dengan total luas tanah 202 m² dan luas bangunan 324 m². Kantor Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah memiliki bangunan permanen dan mendapat tanah hibahan dari pemda Kabupaten Indragiri Hilir. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan meubelair kerja masih belum terpenuhi, untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, serta bangunan dan peralatan laboratorium masih belum terpenuhi. Untuk meningkatkan kenyamanan konsumen atau masyarakat yang berkunjung ke Kantor Loka POM di 19 Kabupaten Indragiri Hilir telah disediakan fasilitas - fasilitas penunjang seperti Ruang Unit Layanan Pengaduan Konsumen, Ruang Tamu dan tempat parkir yang cukup luas.

Pada tahun 2022, pagu anggaran BBPOM di Pekanbaru sesuai DIPA tahun 2022 No. SP DIPA-063.01.2.690484/2022 yang diterbitkan pada tanggal 17 November 2021 sebesar Rp 4.678.700.000,-

Eksternal - Kondisi Geografis dan Demografis

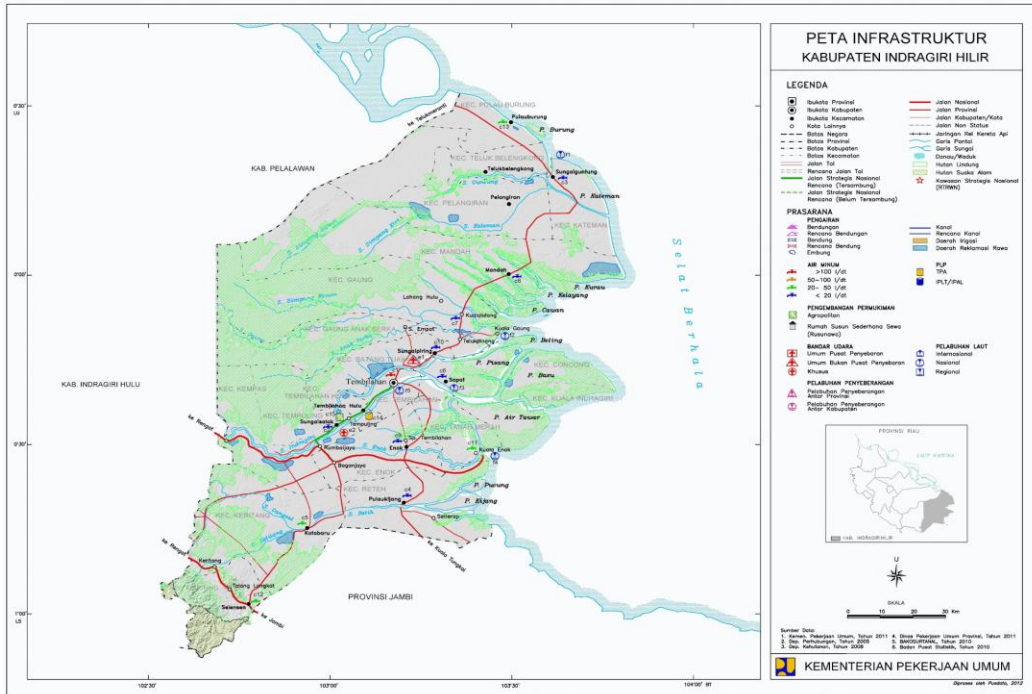
Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai wilayah kerja di dua kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Indragiri Hulu, Loka Pengawas Obat dan Makanan tersebut terletak di Kabupaten Indragiri Hilir antara 1°07'00" Lintang Selatan sampai 0°36'00" Lintang Utara dan 102°30'00" sampai 104°10'00" Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Luas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sekitar 11.605,97 km² untuk daerah daratan dan perairan 7.207 km² dengan jumlah penduduk tahun 2021 sejumlah 658.025 jiwa yang terdiri dari berbagai etnis (sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir). Indragiri Hilir sebelumnya dijuluki dengan “Negeri Seribu Parit” yang sekarang terkenal dengan julukan “**Negeri Seribu jembatan**“ dikelilingi perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa dan laut. Secara fisiologi Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah daratan rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.

Sebagian besar dari luas wilayah atau sekitar 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut (*peat*), daerah hutan payau (*mangrove*) dan terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi.

Dengan ketinggian tersebut, maka umumnya daerah ini dipengaruhi oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan sehingga membentuk gugusan pulau-pulau.



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Indragiri Hilir (sumber: www.riau.go.id dan <https://inhilkab.bps.go.id>)

Sedangkan, Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan wilayah kerja kedua Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah Kabupaten Indragiri Hulu meliputi 8.198,71 km² yang terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi rawa-rawa dengan ketinggian 50-100m diatas permukaan laut. Kabupatenn Indragiri Hulu terletak di antara 0°15'00" Lintang Utara, 1°05'00" Lintang selatan, 101°10'00" sampai 102°48'00' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo Tebo, Provinsi Jambi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 6 jam
2. Paling lama : 48 jam*
3. Paling singkat : 0,5 jam

**Keterjangkauan pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dari lokasi kantor ke titik terjauh pengawasan*

c. Waktu yang diperlukan di Satu Wilayah Kerja

Kabupaten Indragiri Hilir

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 1 hari

Kabupaten Indragiri Hulu

1. Rata-rata : 3 hari
2. Paling lama : 4 hari
3. Paling singkat : 2 hari

Eksternal - Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi:

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah kerja Loka POM di Kab. Indragiri Hilir meliputi unit tranfusi darah, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Instalasi Farmasi Pemerintah, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, dan pangan. Jumlah sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan sesuai data base yang ada dapat dilihat pada tabel bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah sasaran pengawasan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir

No.	Sarana	Kabupaten Indragiri Hilir	Kabupaten Indragiri Hulu
1	Industri Farmasi	0	0
2	Fasilitas Bahan Baku Obat/Produk Biologi/Sarana khusus (Unit Tranfusi Darah, Radiofarmaka, Lab. Sel Punca)	1	1
3	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0
4	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0
5	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	1
6	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0
7	Industri Farmasi yang Memproduksi Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi	0	0
8	Industri Pangan yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0
9	Industri Kosmetik yang Memproduksi Obat Kuasi	0	0
10	Industri Kosmetik	0	0
11	Industri Pangan	12	6
12	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	297	194
13	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	0	1
14	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	1
15	Apotek	40	45
16	Toko Obat	94	47

17	Rumah Sakit	4	3
18	Puskesmas	30	20
19	Klinik	39	49
20	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional dan Obat Kuasi	21	19
22	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	0	0
23	Fasilitas Distribusi Kosmetik	86	92
24	Fasilitas Distribusi Pangan Olahan	390	478
25	Jumlah Sekolah	1132*	511*

Loka POM di Kab. Indragiri Hilir menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan Teknis dan Operasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

- g. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- i. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Tugas dan fungsi tersebut, melekat pada peran Loka POM di Kab. Indragiri Hilir sebagai lembaga pemerintah yang merupakan garda terdepan dalam pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Keunggulan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir :

-
- Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015
 - Pengelolaan persuratan secara online dengan menggunakan aplikasi SIKD
 - Peringkat Realisasi Anggaran UPT Loka POM 5 Tertinggi baik dengan maupun tanpa Belanja Pegawai Hingga Periode Maret 2022
 - Pemanfaatan google drive untuk pengelolaan data kearsipan secara dinamis dan sistematis yang diberi nama e-office
 - Pemanfaatan google sheet untuk pemantauan kegiatan dinas harian melalui Matriks Internal, penelusuran nomor Surat Tugas dan Surat Keluar
 - SELAMAT PAGI (Semua Bisa Buat Laporan Masyarakat Untuk Pengendalian Gratifikasi)
 - Gemilang UMKM (Gerakan Pembinaan Langsung kepada UMKM)
-

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Loka Pom berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dibentuk struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Loka POM

1.4 ISU STRATEGIS

Identifikasi potensi dan permasalahan BBPOM di Pekanbaru dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BBPOM di Pekanbaru dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Pekanbaru perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.4.1 ISU INTERNAL

a. Anggaran

Penggunaan aplikasi SAKTI pada Tahun 2022 terkait pelaksanaan penggunaan anggaran sedikit membuat pencairan anggaran membutuhkan waktu dikarenakan petugas belum memahami secara komprehensif terkait penggunaan modul baru tersebut. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir mengikutsertakan tim pengelola keuangan dalam pelatihan terkait aplikasi SAKTI secara mendalam terhadap semua modul. Meningkatkan Koordinasi dengan KPPN Rengat.

b. Sumber Daya Manusia

SDM yang dimiliki Loka POM di Kab. Indragiri Hilir berjumlah 20 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kab. Indragiri Hilir tersebut belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Kelompok Jabatan yang ada di Loka POM di Kab. Indragiri Hilir hanya kelompok jabatan Fungsional PFM Pertama, belum ada PFM Muda dan jabatan-jabatan pendukung lainnya seperti analis anggaran, arsiparis, perencana dan pengelola BMN. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Serta melakukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Sarana Prasarana

Kantor Loka POM di Kab. Indragiri Hilir berkantor dengan perjanjian sewa di Rumah Toko (Ruko) di kecamatan Tembilahan, gedung kantor belum sesuai standar seperti beberapa fasilitas yang tidak tersedia seperti laboratorium, ruang pelayanan publik (seperti musholla, ruang laktasi), ruang arsip dll, yang menyebabkan Loka POM di

Kab. Indragiri Hilir belum bisa melakukan uji mandiri sehingga sampel yang disampling oleh Loka POM harus dikirim ke Balai Koordinator/Balai Spesifik. Dengan demikian Loka POM di Kab. Indragiri Hilir menjadwalkan dan mengalokasikan anggaran khusus untuk pengiriman sampel dan pengurusan sampel di Balai.

d. Pemanfaatan/dukungan IT

Kegiatan pengawasan erat kaitannya dengan pelaporan yang berkembang dengan pemanfaatan menggunakan berbagai macam aplikasi salah satunya adalah aplikasi SIPT. Penggunaan aplikasi SIPT masih sering mengalami gangguan system pada aplikasi tersebut. Dampaknya, petugas membutuhkan spare waktu lebih banyak karena pekerjaan dilakukan 2 kali, pelaporan manual dan proses input hasil pengawasan sarana dan sampling ke SIPT dikarenakan seringnya gangguan system tersebut. Untuk itu Loka POM di Kab. Indragiri Hilir Menjadwalkan dan mengalokasikan waktu khusus untuk melakukan proses input SIPT

1.4.2 ISU EKSTERNAL

a. Stakeholder

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Kurangnya kemandirian lintas sektor dalam kegiatan pengawasan khususnya kegiatan DAK dan kurangnya anggaran yang dimiliki lintas sector dalam hal perizinan dan pembinaan pelaku usaha obat dan makanan, menjadi penyebab UPT selalu diharapkan menjadi leading sector dalam hal pengawasan obat dan makanan. Untuk itu, solusi yang diharapkan adalah dengan adanya peningkatan pemahaman dan komitmen tanggung jawab lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan DAK dan adanya Penggaran di tingkat pemerintah daerah.

b. Pelaku Usaha

Kesadaran pelaku usaha atas tanggung jawabnya dalam menjamin produk yang diperjualbelikan masih rendah, dengan begitu masih banyak ditemukan produk TMK mengandung bahan berbahaya seperti Rhodamin B dan boraks) di pasaran dikarenakan permintaan masih tinggi. Dengan demikian pengawasan dilakukan secara komprehensif bersama lintas sektor (Dinkes, Disperindag dan POLRES) serta KIE yang rutin dilakukan kepada masyarakat.

c. Masyarakat

Kepedulian masyarakat terhadap obat dan makanan aman untuk dikonsumsi masih rendah, hal itu terjadi karena masih banyak ditemukan kasus penggunaan produk-produk TMK di wilayah pengawasan Kab. Indragiri Hilir dan Kab. Indragiri Hulu. Untuk itu, Loka POM di Kab. Indragiri Hilir melakukan KIE yang dilakukan di tempat-tempat umum, seperti pasar, pelabuhan, dll agar masyarakat yang belum terpapar informasi terhadap Cek KLIK dan Penggunaan Obat dan Makanan aman bisa mendapatkan informasi.

d. Pandemi Covid-19

Kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan pemerintah sangat rendah, hal itu menyebabkan kasus covid 19 di beberapa daerah meningkat sehingga mobilisasi petugas dalam hal pengawasan jadi terhambat. Dengan begitu, petugas pengawasan menyesuaikan alternatif daerah pengawasan dengan kasus covid 19 di beberapa daerah pengawasan dan melakukan desktop inspection serta jika memungkinkan melakukan pembinaan secara online.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA

Rencana strategis adalah merupakan suatu produk dari perencanaan strategis, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan beberapa aspek seperti potensi, peluang dan kendala/hambatan yang dihadapi. Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Rencana Strategis Loka POM di Kab. Indragiri Hilir tahun 2020-2024 telah disusun dan ditetapkan dalam SK Kepala Loka POM di Kab. Indragiri Hilir dengan Nomor HK.02.02.8B.8B5.12.21.1065.1 tanggal 13 Desember 2021. Renstra tersebut memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir, sebagai berikut :

2.1.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah:

Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005- 2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai

wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka BPOM telah menetapkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu:

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Visi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini selaras mengikuti visi BPOM. Penjelasan Visi: Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan bermutu mencakup aspek :

- Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya Saing** : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

2.1.2 MISI

Misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ini selaras dengan misi BPOM. Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan BPOM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan secara komprehensif pada periode 2020-2024, antara lain:

1. Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur

pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (Good Regulatory Practise);

2. Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
3. Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindak lanjut hasil pengawasan;
4. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
5. Orientasi kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM yang juga merupakan misi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap Usaha, Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM), dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
 - a. Standardisasi Obat dan Makanan
 - b. Registrasi Obat dan Makanan
 - c. Registrasi Obat dan Makanan
 - d. Pengujian Secara Laboratorium
 - e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan

2.1.3 TUJUAN

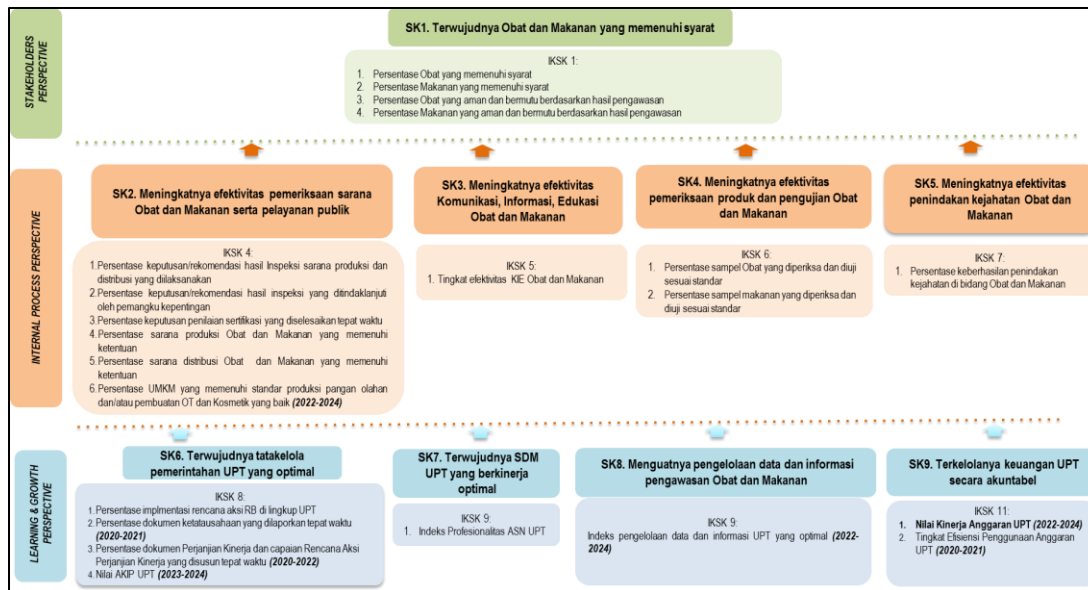
Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tujuan BPOM 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima

2.1.4 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020- 2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II BPOM.

Berikut adalah peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sejak berubah menjadi satker mandiri. Sebelumnya peta strategi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir masuk ke dalam Renstra BBPOM di Pekanbaru tahun 2020 - 2024.



Gambar 2.1 Peta Strategi Level II Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Berikut adalah tabel sasaran strategi dan indikator kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir :

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022-2024

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
Stakeholder	SS 1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
		IKSS 1.3 Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

			IKSS 1.4	Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan
Internal Process	SS 2	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 2.1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan
			IKSS 2.2	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan
			IKSS 2.3	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu
			IKSS 2.4	Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.5	Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
			IKSS 2.6	Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan

				dan/atau Pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik
	SS 3	Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 3.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SS 4	Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 4.1	Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSS 4.2	Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SS 5	Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir	IKSS 5.1	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS 6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Optimal	IKSS 6.1	Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

			IKSS 6.2	Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir (2023-2024)
			IKSS 6.3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (2022)
	SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Berkinerja Optimal	IKSS 7.1	Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir
	SS 8	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSS 8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal
	SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Secara Akuntabel	IKSS 9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

1. Stakeholder Perspective:

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini

jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari : pertama, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Ke-dua, penilaian (pre- market evaluation) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ke-tiga, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.

Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ke-empat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-lima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre- market dan post-market yang profesional dan

independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target 83,00% pada akhir tahun 2024
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu Berdasarkan hasil Pengawasan, dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM “Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

2. Internal Process Perspective

Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagai salah satu UPT Badan POM di daerah, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dituntut untuk mampu mengawal berbagai kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan secara efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing pelaku usaha di Provinsi Riau. Dengan pengawalan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 92% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.

3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 68% pada akhir tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan ot dan kosmetik yang baik, dengan target 78% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 93,6% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk Obat dan Makanan sebagaimana tertuang dalam Visi Badan POM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mengawal hilirisasi hasil riset/inovasi pengembangan obat serta fitofarmaka dalam rangka pemenuhan standar kualitas dan keamanan produk. Selain itu, pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM Obat dan Makanan juga menjadi salah satu

prioritas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir kedepan, agar UMKM Obat dan Makanan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu :

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 89% pada akhir 2024.

3. Learning and Growth Perspective

Sasaran Strategis Ke-6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang Optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024 dan Renstra Badan POM 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir. Pada tahun 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1. Persentase Implementasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target sebesar 100% pada akhir tahun 2024.
2. Nilai AKIP Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dengan target sebesar 83,9% pada akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-7: Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pension dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Indeks Profesional ASN Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan target sebesar 85,75% paa akhir tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada era digital ini. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir mengembangkan sistem informasi sesuai dengan kebutuhan dan dapat diintegrasikan dengan Sistem Informasi Badan POM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal, dengan target sebesar 3.0 di Tahun 2024.

Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola anggaran secara

akuntabel dan tepat dengan ukuran keberhasilannya adalah Indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT, dengan target 93 di Tahun 2024.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

RKT merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Loka POM di Kab. Indragiri Hilir. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/ indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai. RKT disusun dan disahkan setelah dokumen RKP tahun berjalan ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir tahun 2022 dituangkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan Loka POM di Kab. Indragiri Hilir tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	70

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.6
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Persentase dokumen PK dan Capaian RAPK yang diuun tepat waktu	100
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.6

2.3 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

Tabel 2.3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	90.180.300
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	79.398.200
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	38.648.700
4.	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	34.072.800
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	143.514.000
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	45.854.000

	pemangku kepentingan													
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	35.103.000
8.	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	60.041.000
9.	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	302.646.000
10.	Persentase UMKM yang memnuhi tandar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	10	10	30	30	70	70	70	90	90	90	90	70	30.054.000
11.	Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan			92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	92.6	182.920.000
12.	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000
13.	Persentase sampel makanan yang	4.16	8.32	12.5	16.64	20.8	25	29.12	33.28	37.5	41.6	45.76	50	25.000.000

	diperiksa dan diuji sesuai standar													
14.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	7.08	14.16	21.25	28.32	35.4	42.5	49.56	56.64	63.75	70.8	77.88	85	307.080.000
15.	Nilai AKIP UPT												80.6	1.216.407.500
16.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												85.25	100.000.000
17.	Indeksi pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	50.000.000
18.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	7.55	15.1	22.65	30.2	37.75	45.3	52.85	60.4	67.95	75.5	83.05	90.6	696.600.000
19.	Persentase Implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	8.33	16.67	25	33.32	41.65	50	58.31	66.64	75	83.3	91.63	100	1.216.407.500
Total													4.678.700.000	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi menyajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing sasaran strategis kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja Triwulan I tahun 2022 terhadap target triwulan I yang telah ditetapkan, serta dengan dengan target tahun 2022. Kemudian melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, selain itu juga dilakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun capaian sasaran strategis Triwulan I tahun 2022 Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Pencapaian Sasaran Strategis Loka POM di Indragiri Hilir s.d Triwulan I Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	2022			
		Target TW I	Capaian s.d TW I	NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)	Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran terhadap Target TW I 2022
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	79.25	98.22	123.93%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
CAPAIAN “STAKEHOLDERS PERSPECTIVE” = 123.93 %					
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	43	36.17	61.12%	KURANG
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	92.6	96.6	104.32%	BAIK
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	12.5	12.28	98.24%	BAIK
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT	21.25	0	0.00%	-

CAPAIAN "INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE" = 87.89%						
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	20	30.77	133.33%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	-	-	-	CAPAIAN INDIKATOR PER TAHUN	
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	2.25	0.5	22.22%	SANGAT KURANG	
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	22.65	47.414	209.33%	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	
CAPAIAN "LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE" = 121.63%						

3.1.1 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pada Rencana Strategis Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan 9 Sasaran Strategis dan 19 Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan pencapaian sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kab.Indragiri Hilir Triwulan I tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2022						
			Target 2022	Target TW I	% Capaian s.d TW I	% Capaian THD Target TW I 2022	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran terhadap Target TW I 2022	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81.00	81.00	100.00	123.46%	123.93%	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	81.00	81.00	100.00	123.46%		
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.00	78.00	100.00	128.21%		
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	77.00	77.00	92.86	120.60%		
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	88.00	88.00	49.96	56.77%	61.12%	Kurang
		2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	67.00	67.00	37.21	55.54%		

		3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	0.00	0.00%		
		4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	36.00	36.00	25.00	69.44%		
		5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63.00	63.00	53.52	84.95%		
		6	Persentase UMKM yang memenuhi standar	70.00	30.00	30.00	100.00%		
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	92.60	92.60	96.60	104.32%	104.32%	Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	12.50	11.33	90.64%	98.24%	Baik
		2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	12.50	13.23	105.84%		
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	85.00	21.25	0.00	0.00%	0.00%	Sangat Kurang
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	25.00	53.85	215.40%	133.33%	Tidak dapat disimpulkan
		2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)	100.00	15.00	7.69	51.27%		
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	85.25	-	-	-	-	Capaian Indikator Per Tahun
8	Menguatnya laboratorim, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal	2.25	2.25	0.50	22.22%	22.22%	Sangat Kurang
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.60	22.65	47.414	209.33%	209.33%	Tidak dapat disimpulkan

Berdasarkan perbandingan realisasi output sampai dengan triwulan I tahun 2022 dengan target sampai dengan triwulan 1 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

I. Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Sangat Baik” ($110\% < x \leq 120\%$) yaitu:

Tidak ada

II. Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “Baik” ($90\% \leq x < 110\%$) yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 104.32%.
2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT sebesar 98.24%. Sasaran kinerja ini memiliki 2 indikator yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di serta indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

III. Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Cukup” ($70\% \leq x < 90\%$) yaitu :

Tidak ada

IV. Sasaran kegiatan yang tercapai dengan hasil “ Kurang” ($50\% - 70\%$) yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT sebesar 61.12%. Sasaran kinerja ini memiliki 6 indikator yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dan Persentase UMKM yang memenuhi standar. Nilai persentase indikator paling tinggi adalah Persentase UMKM yang memenuhi standar sebesar 100%, dan terendah adalah Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebesar 0% dengan analisis sebagai berikut.

Analisis penyebab :

- a. Persentase nilai keputusan penilaian sertifikasi yang tidak tercapai yaitu sebesar 0%

Analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja

- a. Nilai capaian indikator yang tinggi karna dilakukannya BIMTEK Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pembinaan yang intens kepada pelaku usaha UMKM, sehingga mampu memenuhi standar
- b. Nilai capaian indikator yang rendah karena belum ada permohonan sertifikasi yang masuk di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir.

IV. Sasaran kegiatan dengan hasil capaian “Sangat Kurang” (< 50%) yaitu :

1. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT dengan indikator kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan sebesar 0,00%

Analisis penyebab :

- a. Belum ada kegiatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada TW I

Analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian indikator kinerja

- a. Keterbatasan keahlian dari petugas IT mengenai intelijen siber obat dan makanan
- b. Kondisi personil yang sedikit sehingga kegiatan intelijen dan operasi intelijen harus dilaksanakan hati-hati karena petugas intelijen mudah dikenal disebabkan oleh faktor geografis dan wilayah kerja yang kecil.
- c. Keterbatasan penyidik sehingga harus menyesuaikan waktu perbantuan tenaga dari Balai Besar Koordinator

Evaluasi dan analisis terkait tindak atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya :

- b. Membentuk petugas piket siber Obat dan Makanan
- c. Membuat rencana kerja kegiatan intelijen secara berkala
- d. Membuat rencana operasi penindakan

2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal sebesar 22,22%.

Analisis penyebab :

- a. Penggunaan/pemanfaatan email corporate dan dashboard BOC level kepala unit baru diinisiasi pada bulan Februari serta masih perlu peningkatan partisipasi pemanfaatan email corporate oleh masing-masing pegawai.

Evaluasi dan analisis terkait tindak atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya :

- a. Meningkatkan pemanfaatan email corporate masing-masing pegawai dan dashboard BOC kepala unit.

VI. Sasaran kegiatan dengan hasil capaian tidak dapat disimpulkan (> 120%) yaitu :

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT sebesar 123,93% dengan indikator kinerja Persentase Obat yang memenuhi syarat, Persentase Makanan yang memenuhi syarat, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Analisis penyebab :

- a. Persentase nilai Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan triwulan 1 meningkat dan melebihi target.

Analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

- a. Pengambilan sampel sesuai dengan Pedoman Sampling masing-masing komoditi yang telah ditetapkan.
- b. Pembinaan terhadap UMKM di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, sehingga produk yang dihasilkan sesuai standard mutu dan keamanan.

Evaluasi dan analisis terkait tindak atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya :

- a. Penyesuaian target periode tahun berikutnya dengan realisasi periode ini

2. Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal sebesar 133,33% dengan indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (khusus untuk 25 loka yang jadi Satker mandiri Tahun 2022)

Analisis penyebab :

- a. Capaian Indikator kinerja Persentase implementasi rencana aksi RB di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada triwulan 1 melebihi target yaitu sebesar 215.40% dari target TW I.

Analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

- a. Rencana kerja kegiatan masing-masing area RB wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir banyak diplotkan di TW I sehingga capaian pada TW I cukup tinggi

Evaluasi dan analisis terkait tindak atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya :

- a. Penyesuaian target periode tahun berikutnya dengan realisasi periode ini
3. Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel dengan indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT sebesar 209,33%.

Analisis penyebab :

- a. Nilai persentase EKA yang tinggi di bulan Maret yaitu sebesar 15,11%.

Analisis penunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja :

- a. Nilai persentase NKA yang tinggi karena di bulan Maret terdapat penambahan GPP ASN dan Gaji PPNPN April dan sewa kendaraan periode April-Desember 2022 yang diinput juga ke dalam realisasi SMATR DJA sehingga meningkatkan persentase nilai EKA.

Evaluasi dan analisis terkait tindak atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya :

- a. Penyesuaian penginputan realisasi pada periode berikutnya

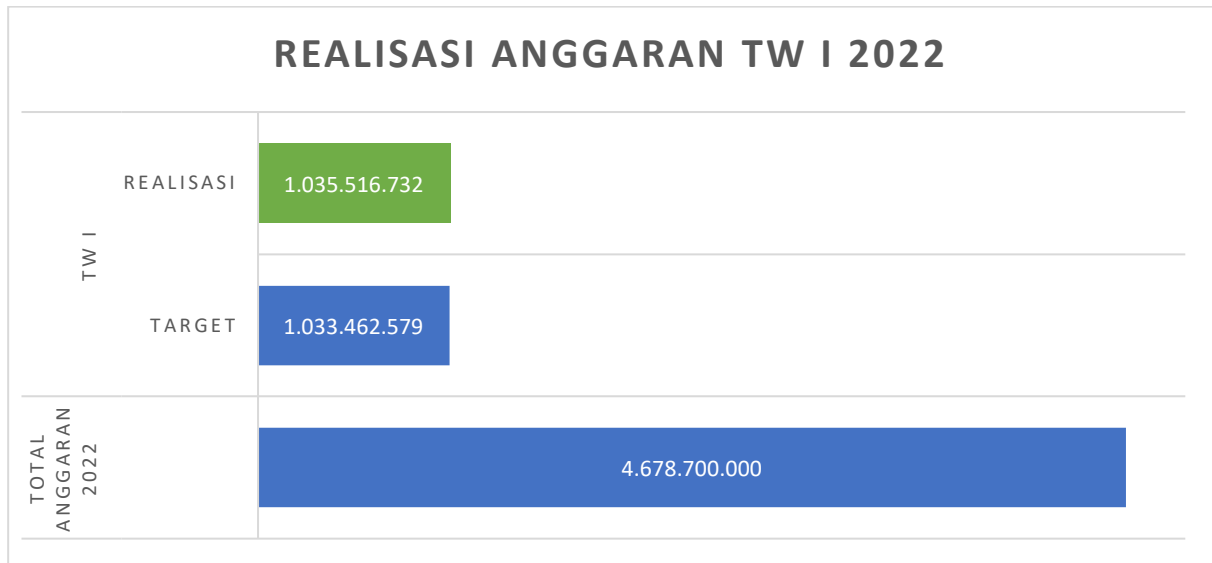
VII. Sasaran kegiatan yang memiliki indikator kinerja dengan pengukuran di akhir tahun

1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir yang berkinerja optimal dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Capaian Indikator kinerja ini diassessment oleh Biro SDM BPOM RI setiap tahun di akhir TW IV.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 memperoleh anggaran sesuai DIPA sebesar Rp.4.678.700.000,-. Realisasi anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir sampai dengan 31 Maret 2022 adalah sebesar Rp.1.035.516.732,- atau 100,2% terhadap target sampai dengan TW I dan sebesar 22,13% terhadap total anggaran tahun 2022. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan Akuntabilitas Keuangan. Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan amanat tersebut mulai tahun 2022 ini dengan membuat laporan akuntabilitas interim sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor

HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 3.1 Realisasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir s.d TW I Tahun 2022

3.3 ANALISA EFISIENSI SUMBERDAYA

Efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembandingan yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Berdasar Analisa efisiensi sumberdaya melalui pengukuran input dan output, hasil tingkat efisiensi kegiatan di Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.3 Hasil Tingkat Efisiensi Loka POM di Kab.Indragiri Hilir Triwulan I Tahun 2022

No	PROGRAM/ KEGIATAN	IE	SE	TE	KATEGORI
1	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	1.35	1	0.35	Efisien
2	Sampel Makanan yang Diperiksa	1.00	1	0.00	Efisien
3	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang diperiksa sesuai Standart	1.35	1	0.35	Efisien
4	Sampel Makanan yang Diperiksa	0.81	1	-0.19	Tidak Efisien
5	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa	0.82	1	-0.18	Tidak Efisien

6	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
7	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
8	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar	0.87	1	-0.13	Tidak Efisien
9	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	2.10	1	1.10	Efisien
10	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	0.31	1	-0.69	Tidak Efisien
11	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai <i>Good Laboratory Practice</i>	1.00	1	0.00	Efisien
12	Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
13	Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hilir	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
14	Layanan Umum	2.16	1	1.16	Efisien
15	Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	0.00	1	-1.00	Tidak Efisien
16	Layanan Umum	1.00	1	0.00	Efisien
17	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan	2.11	1	1.11	Efisien

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa terdapat 9 kegiatan yang tidak efisien yaitu:

1. Sampel Makanan yang Diperiksa
2. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa
3. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa
4. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan
5. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar
6. KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT
7. Laporan dukungan investigasi dan penyidikan obat dan makanan
8. Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Loka POM di Kab. Indragiri Hilir
9. Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan

Analisis Penyebab :

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan masih belum efisien artinya output yang dikeluarkan lebih rendah dari input yang dikeluarkan, disebabkan karena :

- a. Output sudah tercapai sesuai dengan target, namun input yang dikeluarkan melebihi target
- b. Output belum tercapai, seperti sertifikasi yang diselesaikan (belum ada pengajuan sertifikasi yang masuk), dan perkara di bidang penyidikan obat dan makanan (belum ada penindakan perkara)

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan kegiatan-kegiatan berdasarkan target sasaran strategis triwulan 1 yang telah ditetapkan. Terdapat keberhasilan capaian dan juga kekurangan capaian yang telah dianalisis penyebab dan ditentukan tindak lanjut untuk peningkatan capaian pada periode berikutnya.

4.2 SARAN

Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir pada periode berikutnya, maka perlu dilakukan hal-hal berikut :

1. Tindak lanjut terhadap sasaran strategis dan indikator kinerja yang belum mencapai kategori BAIK pada triwulan I tahun 2022;
2. Reviu target indikator kinerja triwulan dan tahunan, khususnya untuk indikator yang mempunyai capaian di atas 120% (tidak dapat disimpulkan)
3. Pemantauan terhadap tingkat efisiensi sumberdaya dalam setiap kegiatan yang dilakukan, khususnya kegiatan utama dengan kategori tidak efisien pada triwulan I tahun 2022.